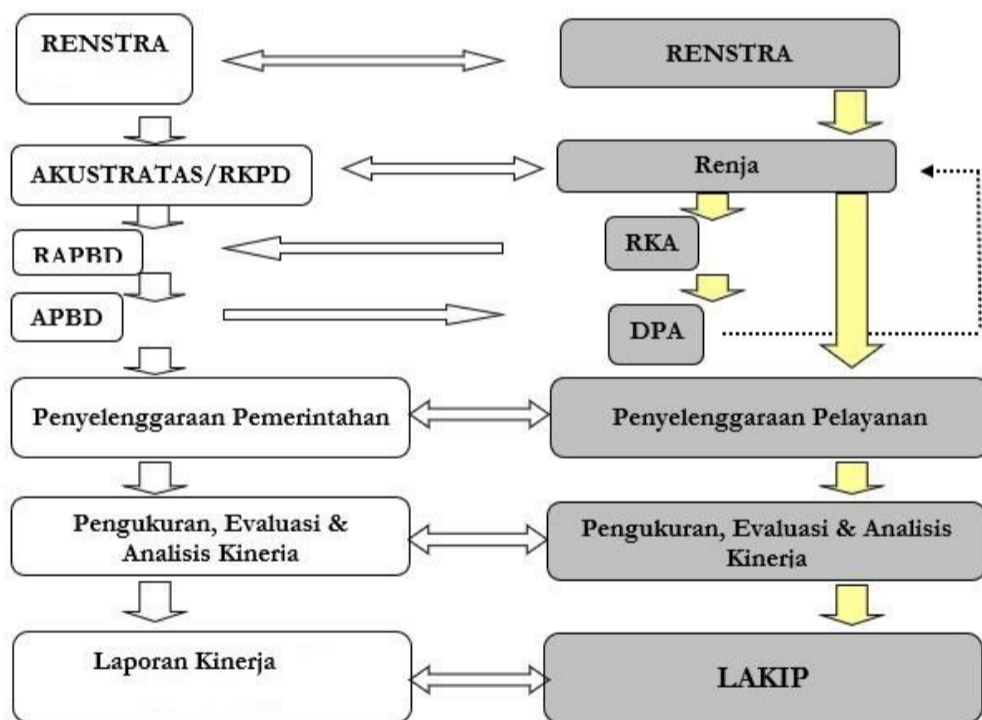


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Tahun 2023 serta Renstra DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Tahun 2021 - 2026 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2023, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2023, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2023, yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Tahun 2023. Alur Pikir Penyusunan LAKIP tersebut disajikan dalam diagram 1.1.

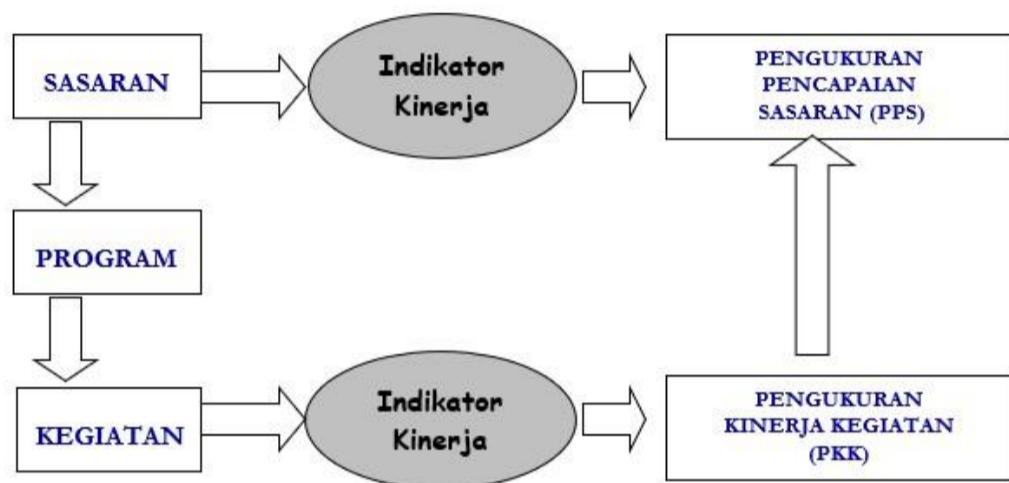
Diagram 1.1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja Sasaran strategis DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. Indikator kinerja Sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam diagram 1.2.

Diagram 1.2. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat maupun antar bangsa. Perdagangan sangat vital perannya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya serta untuk memelihara kemantapan stabilitas nasional.

Kegiatan pengiriman dan pemasukan barang antar pulau di Indonesia tidak terelakan dalam perdagangan nasional. Salah satu komoditi unggulan Kabupaten Manggarai yang lagi gencar dipromosikan adalah komoditi kopi. Tahun 2018 produk komoditi kopi arabika Manggarai Flores telah mendapat sertifikasi yang disebut sertifikasi indikasi geografis. Dengan sertifikat ini, pemerintah mengakui bahwa pemegang hak untuk jenis kopi Arabika Manggarai adalah pemerintah di wilayah Manggarai Raya. Tugas pemerintah adalah terus mendorong petani kopi untuk merawat kopi, melakukan peremajaan kopi yang telah berusia uzur sehingga kuantitas dan kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan selain memberi motivasi dan melakukan pembinaan terus menerus, juga mencari peluang-peluang pasar yang lebih luas dan menjanjikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasar rakyat mempunyai peranan penting dalam menggerakkan dan

menumbuhkan perekonomian masyarakat. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan pasar. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan berusaha untuk menyiapkan pasar yang layak dengan membangun pasar di lokasi yang sudah mempunyai aktifitas pasar untuk menunjang kegiatan pasar.

Selain di bidang perdagangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai juga menangani bidang perindustrian, Jadi dalam satu organisasi perangkat daerah mempunyai dua kementerian yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai Dinas perdagangan mempunyai fungsi untuk mendorong pengembangan industri kecil dan menengah yang ada dengan memberikan fasilitas dan bantuan peralatan yang mendukung kegiatan juga memberikan pengetahuan berupa pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan produksi bagi kelompok IKM.

Dalam rangka mendukung perdagangan nasional, Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai dibentuk Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai. Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Perijinan dan Pengawasan serta kesekretariatan berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan.

## B. Aspek Stratejik Organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, pada prinsipnya meliputi pembangunan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan dapat digambarkan pada tabel Data Perencanaan berikut :

### Data Umum Bidang Perdagangan

Jumlah sarana perdagangan (Pasar) di Kabupaten Manggarai menurut kecamatan sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

Tabel Sarana Perdagangan (Pasar)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PASAR	Jumlah Kios Permanen	Jumlah Petak Dalam Los Permanen	Jumlah Pedagang
1	LANGKE REMBONG	3	84	198	756
2	SATAR MESE BARAT	3	29	36	74
3	SATAR MESE	1	36	80	169

4	SATAR MESE UTARA	2	7	76	54
5	REOK	1	37	42	344
6	CIBAL	1	13	42	166
7	CIBAL BARAT	1	7	12	44
8	REOK BARAT	1	5	12	44
9	LELAK	1	-	56	56
10	RUTENG	-	-	-	-
11	WAE RII	-	-	-	-
12	RAHONG UTARA	-	-	-	-
JUMLAH		14	218	554	1707

Tabel 1.2.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022 Atas Harga yang berlaku (Miliar Rupiah)

Uraian	Kontribusi
Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan dibagi Jumlah Total PDRB x 100 %	Rp. 478,87 ----- X 100 % = 9,58 % Rp. 4.994,85

Data Umum Bidang Perindustrian

Tabel 1.3

Perkembangan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Industri Kecil :	Unit					
	a. Industri Formal	Unit	551	585	303	627	696
	b. Industri Non Formal		285	285	610	1.124	1.174
	Total	Unit	836	870	913	1.751	1.870
2	Tenaga Kerja	org	4.215	4.385	4.385	4.425	7574
3	Nilai Investasi	Rp	15.755.682.200	31.849.234.300	31.849.234.300	32.549.234.300	54.770.014.000
4	Nilai Produksi	Rp	12.386.749.100	36.437.700.000	40.117.470.000	40.117.470.000	58.261.802.000

Tabel 1.4

**Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Tahun 2022 Atas Harga yang berlaku (Miliar Rupiah)**

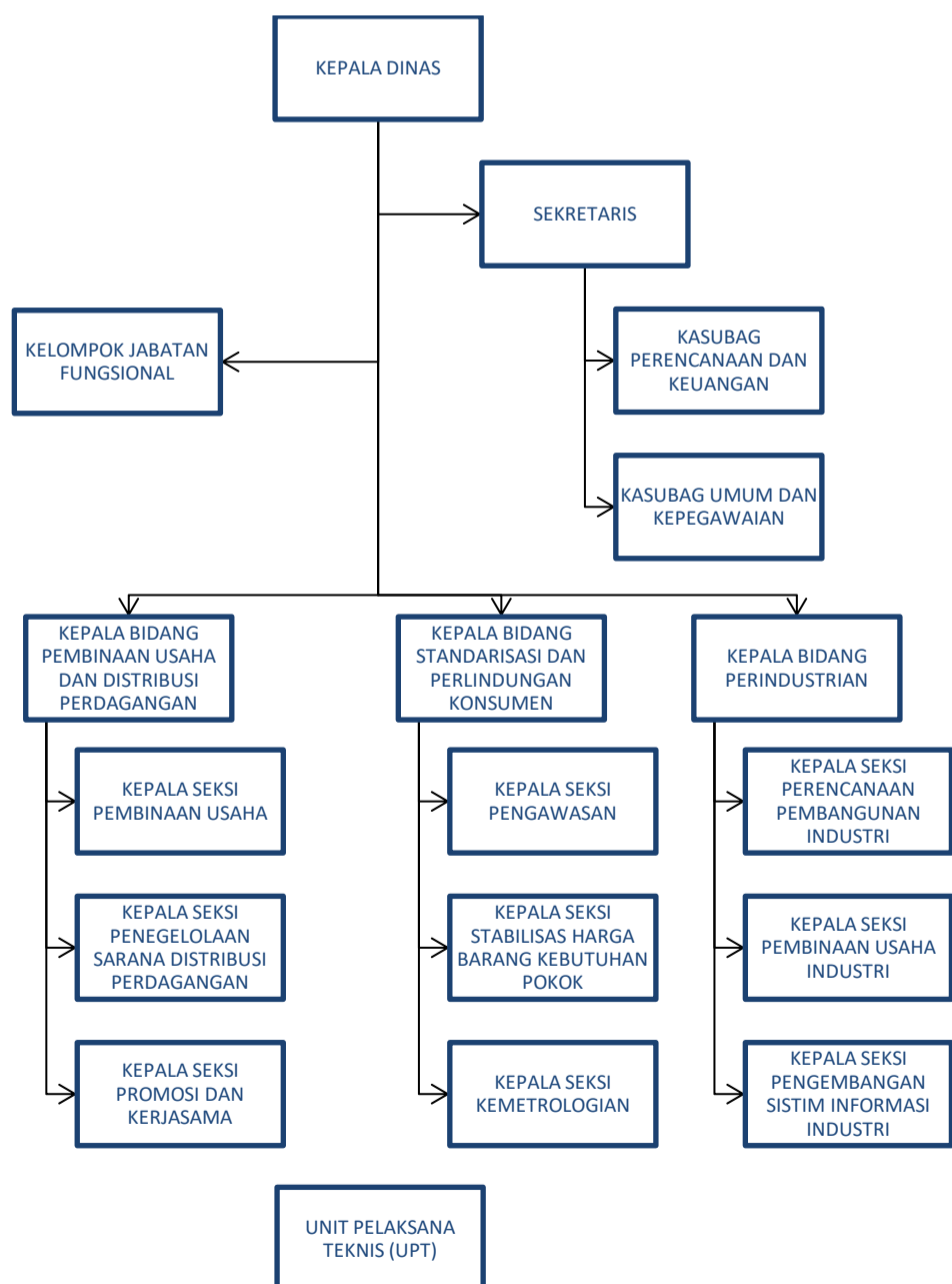
Uraian	Kontribusi
Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perindustrian x 100 %	Rp. 18,56 -----X 100 % = 0,372 %
Jumlah Total PDRB	Rp. 4.994,85

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MANGGARAI

Gambar 1.2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai merupakan Dinas dengan tipe B yang menangani 2 (dua) urusan yaitu urusan perdagangan dan urusan industri. Adapun dukungan sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai per Bulan Juni 2022 sebagai berikut :

- Kepegawaian
- Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Staf  
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan dan Perindustrian per Bulan Juni 2022 sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas : 1 Orang
  - b. Sekretaris : 1 Orang
  - c. Kepala Bidang : 3 Orang
  - d. Kasubag : 2 Orang
  - e. Pejabat Fungsional : 9 Orang
  - f. Staf PNS : 8 Orang
  - g. Tenaga Harian Lepas : 5 Orang
- Susunan Kepegawaian menurut jenjang pendidikan :
  - a. Pendidikan S2 : 1 Orang
  - b. Pendidikan S1 : 16 Orang
  - c. Pendidikan Diploma III: 4 Orang
  - d. Pendidikan SMA : 6 Orang
  - e. Pendidikan SLTP : 1 Orang
  - f. Pendidikan Sekolah Dasar : 1 Orang
- Susunan Kepegawaian menurut golongan :
  - a. Golongan IV : 5 orang
  - b. Golongan III : 14 orang
  - c. Golongan II : 5 orang
- Pendidikan Perjenjangan  
Berdasarkan pendidikan perjenjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai sebagai berikut :
  - a. PIM I : - orang
  - b. PIM II : - orang
  - c. PIM III : - orang
  - d. PIM IV : 5 orang
- Aset yang dikelola  
Sarana penunjang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai terdiri atas:
  - a. Gedung Kantor : 1 Unit
  - b. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 Unit
  - c. Kendaraan Dinas Roda 2 : 14 Unit

Sumber daya aparatur pada Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai diklasifikasikan menurut Pangkat/Golongan, Jabatan Struktural dan Tingkat Pendidikan keadaan 31 Desember Tahun 2022, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

**Tabel 1.5.**

**Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai**

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Livinus V. Livens Turuk, ST. MP NIP. 19730708 200012 1 004	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Dinas
2	Blasius Aloisius Parut, SE 19670419 199703 1 004	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	Bernadus Adur, A.Md 19651012 199403 1 010	Pembina, IV/a	Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
4	Yuliana T. Setia, SP 19701211 200012 2 004	Pembina, IV /a	Kabid Pembinaan Usaha Dan Distribusi Perdagangan
5	Felysianus Jedarut, ST 19780606 200604 1 019	Pembina, IV/a	Kabid Perindustrian
6	Ernestivonny O. Jemada STP 19761122 200312 2 005	Penata Tk.I III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	Adrianus Harianto Baru,SE 19790527 200604 1 009	Penata Tk.I III/d	Penyuluh Perindustrian
8	Yohanes Bastian P. Pano, ST 19790315 200804 1 002	Penata Tk.I III/d	Pengawas Kemetrolagian
9	Ester Rofina D. da Gomez, SH 19800831 200804 2 002	Penata Tk. I , III/ d	Penguji Mutu Barang
10	Benediktus Ngancar, SE 19761214 200903 1 002	Penata Tk.I III/d	Penjamin Mutu Produk
11	Isidorus Fibrino Jemali, SS 19840204 200903 1 007	Penata Tk.I III/d	Analisis Kebijakan
12	Cornelia Novita Bora, A. Md 19711127 200112 2 003	Penata Tk. I , III/ d	Asesor Manajemen Mutu Industri
13	Yohanes J. James Kopa, SE 19770610 201212 1002	Penata , III/ c	Penyuluh Peruidustrian dan Perdagangan
14	Maria Nurmaya Natalis, SE 19821130 201001 2 023	Penata, III/c	Asesor Manajemen Mutu Industri
15	Frans Yoseph Dj. SE 19800203 201212 1 002	Penata, III/c	Penyuluh Peruidustrian dan Perdagangan
16	Noventius H. F. Dugis, ST 19821130 201001 2 023	Penata Muda Tk. I , III/ b	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

17	Karolina Fatima Jenaut 19750517 2002122 009	Penata Muda III/a	Pelaksana
18	Stefanus Seda, A.Md 19700507 201212 1 004	Penata Muda III/a	Pelaksana
19	Pankrasius Reiner Tabing S.T 199706142022021002.	Penata Muda III/a	CPNS Pelaksana
20	Ferdinandus Amal 19781230 200701 1 014	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
21	Thomas Y. Dalung 19780704 200903 1 005	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
22	Aplonia Hoar 19800906 200903 2 008	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
23	Vinsensius Jeharu 19721011 200801 1 008	Pengatur II/c	Pelaksana
24	Donatus Doma 19820907 200801 1 016	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pelaksana

#### D. Maksud dan Tujuan Lakip

##### ❖ Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2021 - 2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### ❖ Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian pada Tahun 2022 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian untuk meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

#### E. Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;

## F. Gambaran Umum Organisasi

### ➤ Gambaran Umum Permasalahan Organisasi

Kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023

dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

➤ **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

▪ **Kedudukan**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Manggarai di bidang Perdagangan dan Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

▪ **Tugas dan Fungsi**

➤ **Tugas**

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan konkuren pilihan bidang perdagangan dan perindustrian.

➤ **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, terdiri dari:

I. Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretaris Dinas, membawahkan:

i. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan:

1. Kustodian Barang Milik Negara
2. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Pengelola Kepegawaian
4. Pengadministrasi Umum
5. Pengemudi

ii. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:

1. Bendahara
2. Pengolah Daftar Gaji

b. Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Distribusi Perdagangan, membawahkan:

- i. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda
- ii. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
- iii. Analis Kebijakan Ahli Muda

c. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:

- i. Penjamin Mutu Produk Ahli Muda
- ii. Penguji Mutu Barang Ahli Muda
- iii. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda
- iv. Penera Ahli Muda

d. Kepala Bidang Perindustrian, membawahkan:

- i. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda
- ii. Analis Kebijakan Ahli Muda
- iii. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda

#### D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Lkip Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

##### BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2022, aspek strategis Organisasi,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi, dasar hukum, serta sistematika penyajian laporan.

## BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja tahun 2022. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan kerangka pengukuran kinerja, perbandingan data kinerja hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektivitas.

## BAB IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2021- 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2021 - 2026 pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui kebijakan dan program, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian memuat Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Stratejik, Sasaran Dan Program Tahun 2021 - 2026

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai yaitu :

**Tabel 2.1.**

**Tujuan Strategis,Sasaran dan Program**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	PROGRAM
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	1. Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu) 2. Persentase produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
3	Meningkatnya stabilitas harga barang.	Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan	1. Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

2. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan
3. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

#### b. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi Amanah dan perjanjian kinerja tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dengan Bupati Kabupaten Manggarai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mencakup sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2021 - 2026 dan setelah anggaran ditetapkan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2022 diprioritaskan kepada pencapaian Sasaran Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK)  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**TAHUN ANGGARAN : 2022**

Tabel 2.2.

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian TA 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu)	Rp. 40.919.819.4000	Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu) Tahun Pengukuran	Bidang Perindustrian
		Persentase produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi	1 %	Jumlah produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi <b>dibagi</b> jumlah produk industri tenun, mebel dan bambu <b>kali</b> 100%	
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	28,77 %	(Jumlah kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan tahun ybs - jumlah kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan tahun n-1) dibagi jumlah kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan tahun n-1 kali 100%	Bidang Pembinaan Usaha dan Distribusi Perdagangan,  Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
3	Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan	Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	100 %	Tingkat Ketersediaan 11 barang pokok dan 7 barang penting di pasaran	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan	42%	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan <b>dibagi</b> jumlah barang yang beredar yang diawasi <b>kali</b> 100%	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	83,33%	Jumlah ketersediaan harga barang pokok yang stabil <b>dibagi</b> jumlah ketersediaan harga barang pokok <b>kali</b> 100%	

Tabel 2.3.  
Tabel Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian TA 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.346.711.511,00	APBD dan APBN
2	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50.600.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	36.700.000,00	APBD
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	20.101.000,00	APBD
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.201.887.924,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>8.656.000.435,00</b>	<b>APBD dan APBN</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Manggarai melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut di atas, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan atau program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 100 Keatas = Target Tercapai
- Di bawah 100 = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	52 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

## B. ANALISIS DAN EVALUASI

Perlu disampaikan bahwa Tahun 2022 merupakan tahun pengukuran kinerja pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, maka Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai menggambarkan capaian awal RPJMD 2021 sampai Tahun 2022. Pencapaian sasaran-sasaran ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Manggarai tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Manggarai, dapat diuraikan sebagai berikut :

### ➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian**

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **71,2%**. Sasaran ini didukung oleh indikator seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Sasaran 1**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Kondisi Awal Tahun 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	
		AKHIR RENSTRA 2026	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu)	Rp.44.292.928.500	Rp.40.919.819.400	Rp.40.117.470.000	Rp.58.261.802.000	142%
2.	Persentase produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi	1,00	1,00	NA	0	0%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 1						71,2%

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian. Target kinerja Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.40.919.819.400;. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kondisi awal, menunjukkan kenaikan, yaitu dengan realisasi sebesar Rp.40.117.470.000 pada tahun 2021 dan realisasi sebesar Rp.58.261.802.000 pada tahun 2022. Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar (100%), maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan capaian 132%. Pencapaian kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang melebihi target ini disebabkan oleh kenaikan jumlah IKM yang signifikan karena mendapat intervensi DAK TA 2022, sehingga mampu menggenjot IKM untuk memproduksi lebih banyak.

Sementara untuk target kinerja Persentase produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi pada tahun 2022 adalah 0%. Sehingga persentasi rata-rata sasaran 1 adalah sebesar 71,2%.

Indikator dari Sasaran 1 ini tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) . Hal - hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah:

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai;
2. Intervensi anggaran baik APBD dan DAK yang memadai untuk tercapainya kegiatan;

3. Pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bantuan mesin dan peralatan;
4. Kelompok IKM merupakan kelompok yang dirintis sendiri untuk memulai kegiatan;

Sementara faktor penghambat yang menyebabkan tercapai/tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :

1. Minimnya ketersediaan fasilitas kerja bagi aparatur;
2. Kemampuan pengrajin khususnya dalam pengembangan produk masih kurang;
3. Kurangnya tenaga teknis khususnya yang berkompeten dalam penanganan kegiatan perindustrian;
4. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan sertifikasi produk;
5. Belum maksimalnya kemampuan dari kelompok penerima manfaat khusus produk perikanan dan produk bambu.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, maka strategi yang dilakukan untuk mengotimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Pelatihan pengembangan produk bagi pengrajin;
2. Bantuan sumber daya industri, sarana dan prasana industri bagi pengrajin;
3. Pelatihan peningkatan SDM untuk *finishing* produk khusus untuk pengrajin mebel dan bambu;
4. Pelatihan pengolahan pasca panen khusus produk jahe.

Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp.73.426.484 dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.346.711.511 sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp. 7.164.972.763 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 1%), dengan capaian kinerja sebesar 133%. Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan yang terdiri dari Program Perencanaan Pembangunan Industri dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.906.553.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.909.213.000,- atau sebesar 99,71%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 8,4% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Terlaksananya bantuan mesin dan peralatan bagi pengrajin IKM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 42 IKM dan realisasi 52 IKM yang terdiri dari :

- Mesin dan peralatan meubel ( 8 paket );
- Mesin dan peralatan pandai besi ( 1 paket );
- Mesin dan peralatan menjahit ( 1 paket );
- Mesin dan peralatan tenun ( 42 paket ).

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.828.270.187;- dari pagu anggaran sebesar Rp.3.834.420.187;- atau sebesar 99,84%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 35% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan Showroom kerajinan IKM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 1 Unit dan realisasi 1 unit, yaitu terbangunnya Gedung Produksi/Showroom beserta meubel dan furniture showroom Industri yang beralamat di Jl. Motang Rua Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.

c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.2.349.585.736;- dari pagu anggaran sebesar Rp.2.519.271.000;- atau sebesar 93,26%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 22% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas SDM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 93 IKM dan realisasi 93 IKM.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini berupa :

- Pelatihan pengolahan jahe kepada 1 IKM : IKM Wae Keno di Desa Bangka Tonggur Kec. Lelak;
- Hibah Uang kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 1.050.000.000;
- Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan manajemen Wirausaha kepada 90 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir;
- Pelatihan Teknik Produksi dan atau Standarisasi Produk kepada 120 pengrajin di 4 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Wongka, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir;

- Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM kepada 20 pengrajin di 3 Desa : Desa Satar Lenda, Desa Cambir Leca, Desa Hilihintir;
  - Kegiatan Pengembangan Dan Diversifikasi Produk kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut :
    - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibai;
    - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
    - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
    - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae.
  - Kegiatan Pengembangan Promosi Produk IKM Untuk Menjalin Kemitraan kepada 92 IKM di 4 Kecamatan, sebagai berikut :
    - ✓ 7 IKM di Desa Rado Kecamatan Cibai;
    - ✓ 10 IKM di Kecamatan Langke Rembong;
    - ✓ 21 IKM di Desa Hilihintir, 5 IKM di Desa Satar Lenda, 10 IKM Desa Terong, 15 IKM Di desa Cambir Leca dan 5 IKM di Desa Wongka Kecamatan Satar Mese Barat;
    - ✓ 4 IKM di Desa bea Kondo, 10 IKM di Desa Todo, 5 IKM di Desa Mata Wae.
- d) Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.80.563.840,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 83.807.324,- atau sebesar 96,13%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 1% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan IKM dengan target perjanjian kinerja sebanyak 110 IKM dan realisasi 120 IKM.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi IKM dan monitoring pembangunan showroom industri.

- **Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian**  
Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **65,7%**. Sasaran ini didukung oleh indikator seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
Capaian Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Kondisi Awal Tahun 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	
		AKHIR RENSTRA 2026	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	56,16%	28,77%	21,92%	18,90%	65,7%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 2						65,7%

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian. Target kinerja persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan pada tahun 2022 adalah sebesar 18,90%;. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kondisi awal, menunjukkan tidak mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar 21,92% pada tahun 2021 dan realisasi sebesar 18,90% pada tahun 2022. Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar 56,16% , maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan capaian 33%.

Indikator dari Sasaran 2 ini juga tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) . Hal - hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah:

1. Intervensi anggaran APBD untuk pencapaian kinerja;
2. Tersedianya sumber daya pendukung

Sementara faktor penghambat yang menyebabkan tercapai/tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :

1. Minimnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan yang memadai;
2. Kurangnya promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, maka strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
2. Pembinaan secara rutin terhadap pedagang/petani dan pelaku usaha;
3. Peningkatan SDM;
4. Promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.



Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp.120.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 107.401.000,00 sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp. 107.281.000 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 0,3%), dengan capaian kinerja sebesar 65,7%.

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang terdiri dari :

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang terdiri dari :

- i. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; sub kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

Penyerapan anggaran untuk Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.36.630.000;- dari pagu anggaran sebesar Rp. 36.700.000;- atau sebesar 99,81%. Penyerapan program, kegiatan sub kegiatan ini sebesar 0,34% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Monitoring Pasar dengan target perjanjian kinerja sebanyak 12 Unit dan realisasi 12 Unit. Pelaksanaan Sub kegiatan ini adalah berupa :

- Monitoring dan evaluasi pasar di Kabupaten Manggarai;
- Pendataan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Reo;
- Pendataan Gudang.

- ii. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, sub kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang ;

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.20.101.000;- dari pagu anggaran sebesar Rp.20.101.000;- atau sebesar 100%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 0,19% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan target 48 unit dan realisasi sebanyak 82 unit atau sebesar 178,3%.

- iii. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, sub kegiatan ;

a. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.27.060.000;- dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.100.000;- atau sebesar 99,85%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 0,25% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan target sebanyak 2 kelompok dan realisasi 2 kelompok yaitu kelompok petani hortikultura dan petani kopi.

Monitoring dilakukan pada 38 kelompok petani kopi.

Hasil Monitoring dari 38 kelompok tani, terdapat 18 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P (Product, Price, Place, Promotion) melalui Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai (MPIG-KAFM)

b. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.23.490.000;- dari pagu anggaran sebesar Rp. 23.500.000;- atau sebesar 99,96%. Penyerapan sub kegiatan ini sebesar 0,22% terhadap pagu anggaran total Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022.

Indikator sub kegiatan ini adalah Tersedianya Data Kelompok Petani Yang Memiliki Jaringan Pemasaran dengan target sebanyak 2 kelompok dan realisasi 2 kelompok yaitu kelompok petani hortikultura dan petani kopi. Monitoring dilakukan pada 138 kelompok petani hortikultura. Hasil Monitoring dari 38 kelompok petani hortikultura, terdapat 29 kelompok yang telah menerapkan metode Marketing Mix 4P (Product, Price, Place, Promotion).

➤ **Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan**

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai **79,3%**. Sasaran ini didukung oleh indikator seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
Capaian Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Kondisi Awal Tahun 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	
		AKHIR RENSTRA 2026	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022		REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100 %	100%
2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan	80%	42%	NA	16,67 %	40%
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	83,33%	83,33%	NA	81,82%	98,2%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 3						<b>79,3%</b>

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan stabilitas harga barang perdagangan. Target kinerja Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja kondisi awal, menunjukkan status mencapai target, yaitu dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2021 dan realisasi sebesar 100% pada tahun 2022. Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan capaian 100%. Pencapaian kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah.

Sementara capaian target kinerja ke-2 yaitu Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan mencapai 16,67%. Capaian ini menunjukkan status di bawah target, di mana target kinerja di Tahun 2022 adalah sebesar 42%. Hal ini disebabkan karena beberapa factor sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa, urusan ini menjadi kewenangan Provinsi. Dan selama tahun 2022, tidak ada pendelegasian dari Gubernur NTT kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan tugas ini;

b) Tidak tersedianya tenaga PPBJ dan/atau PPNS-PK di Kabupaten Manggarai;

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Tahun 2026 yaitu sebesar 80% menunjukkan capaian 21%.

Capaian target kinerja ke-3 yaitu Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok sebesar 81,82%. Untuk mencapai target tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar 83,33%, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan capaian 98,2%.

Indikator dari Sasaran 3 ini juga tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) .

Hal - hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya kinerja ini antara lain adalah:

1. Tersedianya regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
2. Telah ditetapkannya PKS untuk pelaksanaan tugas kemetrollogian;
3. Intervensi anggaran baik APBD yang memadai untuk tercapainya kegiatan;
4. Dukungan pelaku usaha/mitra dengan dinas berjalan dengan baik dalam pelaksanaan pasar murah;

Sementara faktor penghambat yang menyebabkan tercapai/tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur khususnya dalam menangani kegiatan kemetrollogian, PPNS-PK ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen);
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, maka strategi yang dilakukan untuk mengotimalkan capaian kinerja ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dan pelaku usaha;

Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp.1.056.104.084;- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.201.887.924;- sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp. 145.783.840 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 87,9%), dengan capaian kinerja sebesar 79,3%.

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan dan yang terdiri dari :

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 1 program, 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan dan yang terdiri dari :

- i. Program Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan Kegiatan

- a. Kegiatan Pengendalian Harga & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota ; sub kegiatan :
  - i. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota  
Penyerapan anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.69.208.840,- dari pagu anggaran sebesar Rp.69.442.924,- atau sebesar 99,66% . Hasil dari sub kegiatan ini adalah informasi perkembangan harga barang pokok dan barang penting di Kabupaten Manggarai selama tahun 2022.  
Harga rata-rata barang kebutuhan pokok di tahun 2022 adalah sebesar Rp.35.412,- dengan deviasi harga rata-rata sebesar Rp.3.164,- atau sebesar 8,93%.
  - ii. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yg Berdampak dalam 1 (satu) Kab./Kota.  
Penyerapan Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.55.390.000,- dari pagu anggaran Rp.1.110.750.000,- atau sebesar 4,99%. Pelaksanaan sub kegiatan ini dengan melakukan Operasi Pasar Murah di 12 Kecamatan pada 21 titik.
- b. Kegiatan Pengawasan Pupuk & Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; sub kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.  
Realisasi Keuangan Rp. 21.185.000,- dari alokasi pagu Rp. 21.695.000,- atau 97,65 % dengan realisasi Fisik Penyaluran Pupuk sebesar 96.96%. Capaian ini melebihi target sebesar 108% dari target perjanjian kinerja yaitu 90%.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian dari 3 sasaran tersebut adalah sebesar 72,1% atau dengan predikat **“Sedang”**

Tabel 3.4.

Realisasi Total 3 Sasaran Strategis TA 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			RENSTRA	PERKIN	TAHUN 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	1. Nilai produksi IKM (Fokus : Pertanian, Perikanan, Tenun, Mebel dan Bambu)	Rp.40.919.819.400,00	Rp.40.919.819.400,00	Rp58.261.802.000	133%
		2. Persentase produk industri tenun, mebel dan bambu yang tersertifikasi	1,00	1,00	0	0%
	Rata-rata Sasaran Strategis 1					71,2%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	1. Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	28,77	28,77	18,90	65,7%
		Rata-rata Sasaran Strategis 2				65,7%
3.	Meningkatnya stabilitas harga barang perdagangan	1. Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	100,00	100,00	100	100%
		2. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan	42,00	42,00	16,67	40%
		3. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	83,33	83,33	81,82	98,2%
	Rata-rata Sasaran Strategis 3					79,3%
<b>Rata-rata Sasaran 1 s.d 3</b>						<b>72,1%</b>

**C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Kondisi s/d 31 Desember 2022, jumlah pegawai pada Dinas Kabupaten Manggarai adalah 29 Orang yang terdiri dari 24 orang ASN dan 5 orang Non-ASN. Sedangkan Total anggaran yang dialokasikan untuk membiayai sejumlah sasaran di Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai adalah Rp. 10.834.123.350,00,- ( Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ).

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.834.123.350,00,- dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

##### ❖ Belanja Daerah

##### a. Belanja Operasi :

- i. Belanja Pegawai : Rp. 1.774.220.943,-
- ii. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.154.340.220,-
- iii. Belanja Subsidi : Rp. 1.045.090.000,-
- iv. Belanja Hibah : Rp. 1.050.000.000,-

##### b. Belanja Modal :

- i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 99.550.000,-
- ii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 3.710.922.187,-

##### • Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.834.123.350,00</b>	<b>9.536.530.832,00</b>	<b>88,02</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.023.651.163,00</b>	<b>5.729.608.645,00</b>	<b>81,58</b>
Belanja Pegawai	1.774.220.943,00	1.713.623.803,00	96,58
Belanja Barang dan Jasa	3.154.340.220,00	3.067.347.106,00	97,24
Belanja Hibah	1.050.000.000,00	948.637.736,00	90,35
Belanja Subsidi	1.045.090.000,00	-	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.810.472.187,00</b>	<b>3.806.922.187,00</b>	<b>99,91</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.710.922.187,00	3.710.922.187,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.550.000,00	96.000.000,00	96,43

**Tabel 3.6.**

**Realisasi APBD Tahun 2022 Berdasarkan 3 Sasaran Strategis**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Realisasi Capaian Indikator (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>SASARAN 1 :</b> <b>Meningkatnya pertumbuhan sektor industri</b>	<b>7.346.711.511</b>	<b>7.164.972.763</b>	<b>97,53</b>	<b>71,2</b>
<b>Program :</b> <b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	7.346.711.511	7.164.972.763	97,53	148
<b>Kegiatan :</b> Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.346.711.511	7.164.972.763	97,53	
<b>SASARAN 2 :</b> <b>Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan</b>	<b>107.401.000</b>	<b>107.281.000</b>	<b>99,89</b>	<b>65,7</b>
<b>Program 1 :</b> <b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	50.600.000	50.550.000	99,90	337
<b>Kegiatan :</b> Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50.600.000	50.550.000	99,90	
<b>Program 2 :</b> <b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	36.700.000	36.630.000	99,81	94
<b>Kegiatan 2 :</b> Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	36.700.000	36.630.000	99,81	
<b>Program 3 :</b> <b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	20.101.000	20.101.000	100	172,4
<b>Kegiatan :</b> Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	20.101.000	20.101.000	100	
<b>SASARAN 3 :</b> <b>Meningkatnya stabilitas harga barang.</b>	<b>1.201.887.924</b>	<b>145.783.840</b>	<b>12,13</b>	<b>79,3</b>



<b>Program :</b> <b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	1.201.887.924	145.783.840	12,13	104
<b>Kegiatan 1 :</b> Kegiatan Pengendalian Harga & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	1.180.192.924	124.598.840	10,56	
<b>Kegiatan 2 :</b> Kegiatan Pengawasan Pupuk & Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.695.000	21.185.000	97,65	
<b>TOTAL REALISASI ANGGARAN UNTUK 3 (TIGA) SASARAN STRATEGIS</b>	<b>8.656.000.435</b>	<b>7.418.037.603</b>	<b>85,70</b>	<b>72,1</b>

## BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2022.

Secara umum, faktor keberhasilan yang menjadi kunci sukses pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah :

1. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dalam pencapaian kinerja.
2. Intervensi Anggaran DAK yang sangat membantu mendorong pencapaian kinerja urusan Perindustrian.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah :

1. Permasalahan / hambatan di bidang Kepegawaian :
  - a. Jumlah Pegawai masih sangat terbatas;
  - b. Kurangnya Aparatur dengan kualifikasi khusus pada kegiatan Kemitrologian dan Pengawasan Barang Beredar Yang Diawasi;
2. Permasalahan/hambatan di bidang Keuangan :
  - a. Terbatasnya alokasi anggaran akibat dari rasionalisasi pada beberapa kegiatan yang berdampak langsung pada sasaran strategis OPD;
3. Permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan:
  - a. Tidak adanya kegiatan khusus terkait Pengawasan Barang Beredar yang Diawasi, karena kegiatan ini sudah merupakan kewenangan Provinsi;
  - b. Belum didapatinya regulasi yang sesuai tentang pemberian Subsidi Harga Barang Pokok dan Barang Penting kepada Badan Usaha Milik Swasta untuk kegiatan Pasar Murah.

Langkah-Langkah Antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendala tersebut :

1. Mengusulkan penempatan pegawai diharapkan sesuai latar belakang Pendidikan terutama untuk tenaga Kemitrologian;
2. Jumlah anggaran harus mencukupi terutama yang berdampak langsung dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Tahun 2022. Bersama ini dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Ruteng, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Manggarai,



LIVINUS V. LIVENS TURUK, S.T.,M.P.

Pembina TK.I

NIP.19730708 200012 1 014